

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, harus diimbangi dengan suatu tanggung jawab, baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum. Pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, membawa pengaruh pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum. Hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dan peranan Notaris menjadi sangat kompleks. Sehingga semakin sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.<sup>1</sup>

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>2</sup>

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, (Surabaya : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>2</sup> N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.<sup>3</sup> Notaris sesungguhnya sebagai suatu jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.<sup>4</sup>

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena dengan adanya akta otentik tersebut

---

<sup>3</sup>Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

<sup>4</sup>Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261.

akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Menurut Muhammad Adam menyebutkan bahwa :<sup>5</sup>

“Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan - perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan”.

Tugas Notaris sebagai pejabat publik juga memiliki keistimewaan atau kekhususan seperti hakim yaitu mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Akta Notaris, adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna atau *volledig* dalam bidang hukum perdata.

Jasa notaris yang berorientasi ke masa depan, semakin disadari adanya suatu tuntutan untuk memiliki kemandirian ilmu dan disiplin kerja yang tinggi. Kinerja notaris selain berbekal pendidikan formal dan pengalaman magang sebelum calon notaris diangkat sebagai notaris, maka ia juga harus menyadari landasan sumpah jabatan, kode etik profesi, dan norma moral dalam menjalankan tugasnya. Notaris dibutuhkan jasanya oleh masyarakat, karenanya ia harus profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, juga dituntut untuk menjaga

---

<sup>5</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hlm. 31.

integritas moral dan kejujuran atas kepribadiannya, guna menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris dalam mengemban jabatannya, sehingga pelayanan jasanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang berimplikasi pada gugatan yang tidak diharapkan.

Kinerja notaris yang diharapkan profesional tersebut, kenyataannya masih jauh dari kualitas yang diinginkan. Kinerja notaris nampaknya kurang mampu melakukan tugasnya secara profesional dan dijumpai kasus malapraktik dan akta berpotensi konflik. Sehingga dari jabatan notaris yang seharusnya mampu memprotek terjadinya konflik, justru terjebak pada pembuatan akta yang berujung pada konflik. Tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar tidak menimbulkan konflik dimudian hari, tetapi pada faktanya sering terabaikannya kode etik dan peran pengawasan, menjadikan tugas dan tujuan tersebut jauh panggang dari pada api.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara komprehensif.

Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya sesuai dengan aturan dan terikat dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama baik untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata maupun di dalam kehidupan masyarakat, maka

diperlukan adanya kode etik serta pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya. Di bidang kenotariatan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum yang sudah ada.<sup>6</sup>

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Tugas dan Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004, menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigrif Publishing, 1994), hlm. 4.

Menjalankan fungsi pengawasan dengan baik apabila telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya, Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta bagi pihak yang membutuhkan. Pengawasan dilakukan supaya mendorong seorang Notaris menjadi lebih profesional dalam kedudukannya sebagai pejabat umum. Terwujudnya profesionalisme Notaris, maka Notaris seutuhnya dapat menyadari bahwa tugas dan jabatan yang diembannya adalah

untuk kepentingan masyarakat dan Negara, sehingga Notaris harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan Negara di atas kepentingan pribadinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang awalnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu hakim setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengawasan tersebut khususnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76); Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 73); dan Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.(Pasal 69).

Anggota Majelis Pengawas Notaris terdiri dari sembilan orang, (pasal 67) yang terbagi atas, yaitu :

1. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
3. Unsur ahli / akademis 3 (tiga) orang.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Menteri berwenang dalam mengawasi Notaris

dan dalam melaksanakan pengawasannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pelaksanaan pengawasan Notaris tersebut, terdapat ketimpangan-ketimpangan. Adapun ketimpangan-ketimpangan yang dihadapi antara lain:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris belum mempunyai kantor kesekretariatan yang mandiri, yang ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas MPD;
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mempunyai dan tidak didukung oleh dana operasional yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. Tempat kedudukan Majelis Pengawas Daerah terbatas pada kota-kota besar dan keadaan SDM yang ada tidak sebanding dengan Jumlah anggota Ikatan Notaris Indonesia;
4. Masih terdapat anggota Majelis Pengawas yang belum memahami dan menguasai pengetahuan, dan keterampilan berhubungan dengan fungsi pengawasan yang ditugaskan kepadanya;
5. Sosialisasi yang terbatas terkait dengan tugas dan fungsi Notaris dalam perkembangan peraturan terkini, sehingga masih terdapat beberapa Notaris yang tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tidak terdapatnya tempat penyimpanan Protokol Notaris yang memenuhi standar birokrasi modern, menjadi hambatan tersendiri



dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris, khususnya dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris bagi Notaris Pengganti.

7. Aturan-aturan pelaksana tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris saat ini dinilai belum lengkap.

Nilai positif dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>7</sup>

Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung ( Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

---

<sup>7</sup> Majalah Renvoi, *Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru*, Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006, Hlm. 10.

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris. Implementasi kewenangan Majelis Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.<sup>8</sup> Sehingga perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut tentang: MODEL IDEAL MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SEBAGAI BADAN YANG MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS, termasuk permasalahan dan solusinya dalam menyingkapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap tugas Notaris di Kota Semarang ?
2. Bagaimana model pengawasan terhadap Notaris?

---

<sup>8</sup> Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.56.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kaitannya dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja Notaris di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui model (format) yang ideal bagi Majelis Pengawas Notaris.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya mengenai fungsi pengawasan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

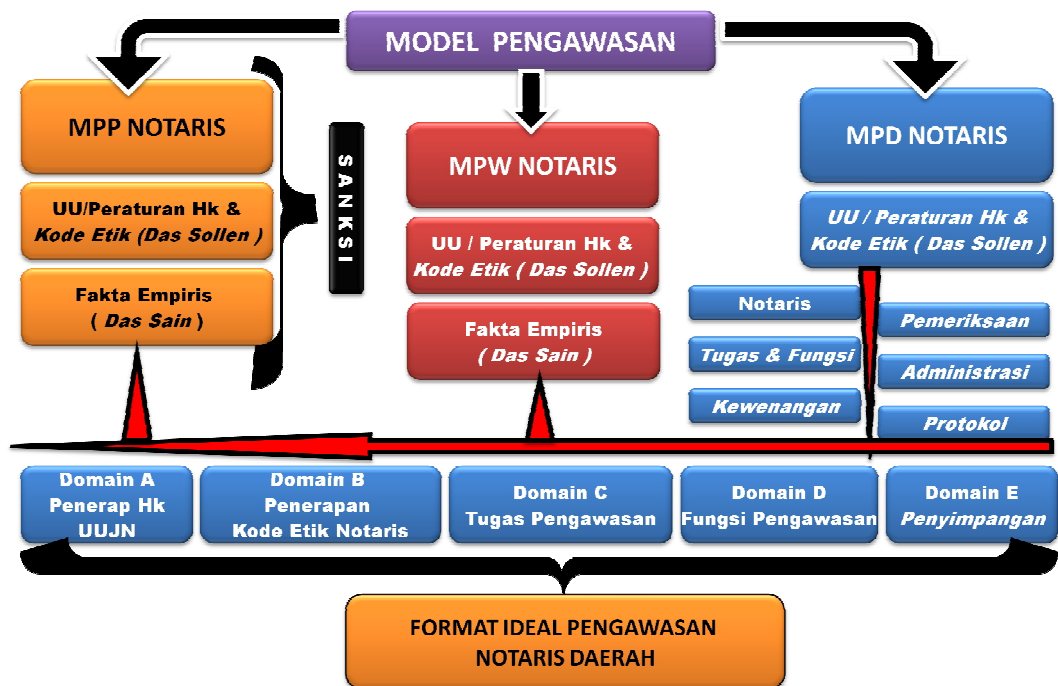
Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bahan kajian tentang Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah secara praktis bisa digunakan oleh para Notaris untuk menjalankan profesinya secara profesional.
- b. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Para Notaris yang ada di wilayah kerjanya.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Kerangka Konseptual



### 2. Kerangka Teoritik

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana pasal tersebut menyatakan :

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>9</sup>

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hlm. 31.

<sup>10</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2 Alumni, Bandung, 1983, hlm. 41.

Berlakunya Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004, memberikan pengaturan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris, kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum yang menyangkut isi akta yang dibuatnya. Oleh karena itu agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.<sup>11</sup>

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan

---

<sup>11</sup> Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, yang dibacakan oleh Hasanuddin, yang ketika itu sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI, pada acara pembukaan Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makasar, Sulawesi Selatan, dengan Topik *"Melalui Implementasi Undang-undang tentang Jabatan Notaris pada era Reformasi, Kita tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat"*.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Notaris di Propinsi Jawa Tengah, Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Kota Semarang dan unsur akademis dari Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan, dimana hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari segi yuridis ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>12</sup> karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

### **3. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Semarang, khususnya Majelis Pengawas Daerah, INI Daerah Kota Semarang, Majelis Pengayoman INI Daerah Kota Semarang dan Kantor-kantor Notaris di Kota Semarang.

### **4. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam tesis ini adalah Majelis Pengawas Daerah di Kota Semarang, Notaris dan Ahli Hukum di bidang Kenotariatan.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah implementasi kaitannya dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja Notaris di Kota Semarang dan format ideal bagi Majelis Pengawas Notaris.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

### a. Penelitian lapangan.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui :

- 1) Wawancara / Interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>13</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan anggota MPD Notaris Kota Semarang; Suyanto, SH., Ketua Majelis Pengayoman Notaris Kota Semarang; Dr. Widhi Handoko, SH, Sp.N, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang; Ngadino, SH, MHum. Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia kota Semarang; Aris Budiyanto, SH, dan ahli hukum di bidang kenotariatan sekaligus sebagai anggota MPD Notaris Kendal Prof. Dr. Suteki, SH, MHum. Juga Notaris dan ahli hukum kenotariatan: Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH, MHum,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Ibid*, hlm. 57

Sp.N, serta pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 2) Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian.

Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

- b. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data.

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - b) Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl. 1860-3);
  - c) Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 )

- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif yaitu :

- a. Analisis :

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

- b. Kualitatif :

Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang masing-masing saling berkaitan. Gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini didahului dengan mengemukakan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menyajikan tentang berbagai tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan umum ini diuraikan menjadi beberapa sub bab. Pada sub bab yang pertama akan diuraikan Tinjauan Umum Mengenai Notaris yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga poin penjelasan yaitu pengertian Notaris, Dasar Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia. Sedangkan pada sub bab yang kedua akan diuraikan tinjauan umum mengenai Pengertian Pengawasan, Pengawasan Notaris Menurut Undang-undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dibagi menjadi empat poin penjelasan yaitu Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Pengawas Notaris, Kewenangan Pengawas Notaris dan Struktur Organisasi. Sub bab

yang terakhir akan menyajikan Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris, yang selanjutnya dibagi menjadi dua poin penjelasan yaitu Pengawasan Terhadap Profesi Notaris dalam Perkembangannya Serta Penjabaran Mengenai Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya serta Tata Cara Pengawasan Notaris.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Dengan mengacu pada fakta yang dihubungkan dengan data dan hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat merupakan landasan untuk menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pada sub bab yang pertama dipaparkan Gambaran Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, kemudian pada sub bab selanjutnya akan dipaparkan pembahasan pokok permasalahan tentang Implementasi Tugas Pengawasan Hukum Terhadap Kinerja Notaris, dan uraian tentang jawaban pembahasan pokok permasalahan yang kedua yaitu tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kinerja Notaris di Kota Semarang, pada sub bab selanjutnya dengan pembahasan Model (Format) Yang Ideal Bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga bisa terwujud secara efektif dan efisien.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab satu sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris**

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.<sup>14</sup>

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur  $\pm$  145 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru dalam kalangan masyarakat. Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara, Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*Latijnse notariaat*" dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat

---

<sup>14</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13.

oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.<sup>15</sup>

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

## 2. Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.<sup>16</sup>

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang

---

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.3-4.

<sup>16</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hlm, 13



berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam

---

<sup>17</sup> Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005), hlm. 60.

suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 ( dua puluh tujuh ) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S2) Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau

atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

### 3. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860,

---

<sup>18</sup> Djuhad Mahja, *Op.Cit*, hlm. 60.

peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.<sup>19</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor. 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Ke Notarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

Peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor. 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris, yang peraturan pelaksanaannya dimuat di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>19</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hlm.41.

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Melihat fakta dan keadaan sekarang ini perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Berlakunya undang-undang tersebut, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor. 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### 4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris

*Tugas* dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh

aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>20</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>21</sup>

a. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32.

<sup>21</sup> Tan Thong Kie (a), *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.157.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 66-67

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;
- g) membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

4) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
  - a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 67



dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 ( lima ) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 ( dua ) orang saksi dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,  
saksi dan Notaris;

m) menerima magang calon Notaris.

2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b) penawaran pembayaran tunai;

c) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d) akta kuasa;

e) keterangan kepemilikan; atau

f) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 ( satu ) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

- 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

c. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 69

## 5. Pemberhentian Notaris

Tiga permasalahan diatur tentang pemberhentian Notaris:

### a. Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada di bawah pengampunan ;
- 3) Melakukan perbuatan tercela ; atau
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, ada ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- 1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

## **B. Tinjauan Umum Majelis Pengawasan Notaris.**

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Mengenai arti dari pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, adalah sebagai berikut :

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:

#### **a. Menurut P. Nicolai**

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>25</sup>

#### **b. Menurut *Lord Acton***

Pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung

---

<sup>25</sup> Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara*". Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm.311.

disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.<sup>26</sup>

- c. Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris.

Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah kedudukannya.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>26</sup> Diana Hakim Koentjoro. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004. hlm.70.



Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, diantaranya Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.

Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

- e. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus

meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

## 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

### 1) Pengawasan Intern

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Diana Hakim Koentjoro. *"Hukum Administrasi Negara"*. Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004. hlm.71-72.

- i. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
- ii. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- iii. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- iv. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- v. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

- vi. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
- b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:<sup>28</sup>
  - i. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
  - ii. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 72-73.

## 2) Pengawasan *Exteren*

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

### a) Pengawasan *Preventif* dan *Represif*<sup>29</sup>

Yang dimaksud Pengawasan *Preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan *Represif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.73-74.

b) Pengawasan Dari Segi Hukum<sup>30</sup>

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.<sup>31</sup>

Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>32</sup>

c) Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

i. Kontrol A- Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm.74

<sup>31</sup> E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"*, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 1990, hlm.127.

<sup>32</sup> Ridwan HR. *"Hukum Administrasi Negara"*. Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm. 314.

<sup>33</sup> *Ibid*.hlm. 312.

ii. Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

d) Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi<sup>34</sup>

i. Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

ii. Kontrol dari Segi Kemanfaatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.

Penjelasan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 312

kepastian hukum bagi masyarakat. Selain hal tersebut, sisi lain dari pengawasan Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### 3. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.



Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu

badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

#### 4. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. Tahun 1847 No.23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor. 135 dan pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor. 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2

tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor. KMA/006/SKB/VII/1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam pasal 54 Undang-undang Nomor. 8 tahun 2004.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran, bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, karena pada waktu itu kekuasaan Kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor.5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari sisi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor. 8 tahun 2004, dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain. Dalam hal ini Badan Peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap Badan Peradilan, sehingga tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam pasal 54 UU Nomor. 8 tahun 2004 dicabut oleh pasal 91 UUD.

Setelah berlakunya UUD Badan Peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi

terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

#### 5. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan Notaris pada awalnya dilakukan oleh Menteri yang tugas kewenangannya ditugaskan kepada Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 ( tiga ) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 ( tiga ) orang;
- c. Akademisi sebanyak 3 ( tiga ) orang ;

Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut :

**a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut :

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :

Pasal 23 menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

- (5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24 menyatakan bahwa :

- (1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
- (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- (4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUN juga berwenang untuk:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,



huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

**b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

Selanjutnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di tingkat propinsi meliputi :

Pasal 25, menyatakan bahwa,

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
- (2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26, menyatakan bahwa

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.

- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27, menyatakan bahwa

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah inengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- (4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 28, menyatakan bahwa

- (1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Sehingga dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) posisinya hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau bisa juga sebagai Majelis Pemeriksa tingkat pertama apabila dalam suatu daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).

**c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

Pasal 29, menyatakan bahwa

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinanya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30, menyatakan bahwa

- (1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
- (2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Pasal 31, menyatakan bahwa

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa :
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pemberhentian sementara;
  - d) Pemberhentian dengan hormat; atau
  - e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32, menyatakan bahwa

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- (2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33, menyatakan bahwa

- (1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34, menyatakan bahwa

- (1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding.
- (2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
- (3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

- (4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- (5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
- (6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35, menyatakan bahwa

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.
- (2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
- (3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan diucapkan.

- (4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.
- (5) Menteri memberi Putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- (6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) memeriksa dan memutuskan banding pihak yang tidak menerima putusan MajelisPengawas Wilayah (MPW).



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Tugas Notaris Di Kota Semarang.**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh MPD Notaris Kota Semarang meliputi kegiatan pengawas dalam mengamati, mengontrol, memperhatikan dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak, terhadap fungsi, tugas dan kewenangan Notaris.

Jabatan Notaris adalah jabatan publik dengan lingkup kerja dalam wilayah hukum privat. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

##### **1. Fungsi Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris**

Setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk

menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>35</sup>

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris diperlukan karena Notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris mengawasi bukan saja perilaku Notaris, tetapi juga pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>36</sup>

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib

---

<sup>35</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hlm. 233

<sup>36</sup> Widhi Handoko, *Ketua Majelis Pengayoman INI Daerah Kota Semarang*, memberi penjelasan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Notaris oleh MPD masih jauh dari ideal yang dikehendaki atau yang dicita-citakan oleh UUJN, pada faktanya pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada jabatan Notaris sekedar untuk memenuhi formalitas dari UUJN, karena pelaksanaan mana hanya bersifat seremonial dan tidak dilaksanakan secara serius serta tidak meliputi *substantif* hukum dari pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan itu sendiri. Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2012.

menjunjung tinggi martabat jabatannya. Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.<sup>37</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan. Dengan demikian fungsi pembinaan ini didahulukan dari pada fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin disampaikan oleh pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris kepada para Notaris khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan dari pada fungsi pengawasan dikarenakan terkait dengan kedudukan Notaris sebagai jabatan atau profesi yang mulia (*offium nobile*), sehingga seorang Notaris harus mampu

---

<sup>37</sup> Aris Budiono, Sekretaris INI Daerah Kota Semarang, Hasil Wawancara, tanggal 2 Maret 2012.

menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut.<sup>38</sup>

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri, dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.<sup>39</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta sangat berpengaruh terhadap hubungan lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perilaku Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah berupaya menghindari penyalahgunaan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga keterukuran pro-pesionalitas jabatan Notaris antara lain diuji dari pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>38</sup> Aidir Amin Daud, *Makalah Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Profesi Notaris*, Semarang: pada tanggal 07 Pebruari 2011.

<sup>39</sup> Suyanto, *Ketua MPD Notaris Kota Semarang*, hasil wawancara pribadi, tanggal 1 Maret 2012.

Ketentuan ini mengamanatkan agar dalam menjalankan, Notaris berkewajiban : bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut tidak boleh tidak dan wajib dilaksanakan, bahkan diperkuat dengan Kode Etik Jabatan Notaris, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan :

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
- b. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Notaris dalam praktik melaksanakan tugas dan jabatan masih ditemui beberapa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku sehingga tidak sedikit Notaris yang digugat oleh pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya, dan Notaris diajukan ke proses peradilan baik secara pidana maupun secara perdata. Notaris dalam pemanggilan oleh pihak penyidik untuk proses peradilan yang terkait dengan perkara pidana dan perkara perdata di Kota Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngadino, sebagai sekretaris INI memberikan laporan mengenai pemanggilan notaris oleh pihak penyidik di kota Semarang baik yang disetujui

untuk dilakukan pemanggilan dan tidak disetujui untuk dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik.<sup>40</sup>

## **2. Tujuan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Pemahaman tersebut dapat penulis jelaskan bahwa tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun demikian

---

<sup>40</sup> Ngadino, *Ketua INI Daerah Kota Semarang*, hasil wawancara pribadi tanggal 1 Maret 2012. Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Bab IX tentang Pengawasan.

pada kenyataannya praktik di lapangan antara konsep *ideal* dan *existing* tidak sesuai, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi terjadinya ketidak- sesuaian antara konsep *ideal* dan *existing* terkait dengan adanya fungsi dan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh MPD Notaris Kota Semarang.

Pengawasan Notaris di Kota Semarang meliputi adanya aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pengawasan terhadap Notaris Kota Semarang secara umum dilakukan berdasarkan Kode Etik dan UUJN. Pengawasan dalam Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh MPN.

Kode Etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode Etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika

hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.<sup>41</sup>

Pengawasan menurut Kode Etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

---

<sup>41</sup>Dikutip dari Abdulkadir Muhammad, "*Etika...Op. Cit*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 89



- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Keterlibatan unsur Notaris dalam MPN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam.<sup>42</sup> Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Jumlah Notaris di Kota Semarang relatif banyak lebih kurang 150 Notaris sampai dengan 200 notaris,<sup>43</sup> dan ini merupakan tantangan yang cukup berat di bidang pengawasan. Jumlah Notaris yang banyak itu menurut sebagian kalangan dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan, karena memudahkan

---

<sup>42</sup> I Nengah Mudani, MPN Daerah Kota Semarang, DepKumHam, tanggal 2 Maret 2012

<sup>43</sup> Ngadino, Ketua INI Daerah Kota Semarang, wawancara pribadi, tanggal 1 Maret 2012

masyarakat mendapat pelayanan hukum dari kantor Notaris, namun demikian pada sisi lain peningkatan jumlah Notaris itu tidak selalu menunjukkan peningkatan kualitas, semakin banyak jumlah Notaris semakin besar kemungkinan pelanggaran, misalnya pelanggaran wilayah kerja, perangkapan jabatan, pelanggaran hukum di bidang keperdataan maupun pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri dapat memberhentikan Notaris apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara.

### **3. Tugas dan Wewenang Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris di Kota Semarang.**

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, sebagai sebuah badan pengawasan yang masih relatif muda. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan kedepan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya secara efektif.

Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, mengimplementasikan dan mengefektifkan kinerja MPD sebagai kewenangannya yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang;
2. Memanggil Notaris terlapor dan pelapor;
3. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan dan mencatatnya dalam sertifikat cuti;
4. Menetapkan Notaris pengganti
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris pemegang Protokol;
7. Menerima laporan dari masyarakat terhadap Notaris;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada MPW;
9. Memberi paraf dan menandatangani buku reportorium;

10. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Permen tentang Majelis Pengawas.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu:

1. Membuat catatan pemeriksaan dalam Protokol Notaris;
2. Membuat berita acara pemeriksaan;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap putusan penolakan cuti;
7. Menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan dan laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari kepada MPW;
8. Melaporkan ke instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Tugas dan wewenang dari Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Semarang yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang

Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, mengandung maksud bahwa keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak ada dominasi oleh satu unsur kepada unsur lain dalam kepentingan pemeriksaan terhadap Notaris, sehingga tidak ada keberpihakan. Sesuai dengan fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan, baik berupa kode etik, yang melibatkan Majelis Pengawas Notaris.

Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya badan yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.<sup>44</sup>

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, untuk Majelis Pengawas Daerah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Notaris adalah kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai *supporting agency* dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris yang didelegasikan oleh Menteri.<sup>45</sup>

Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

---

<sup>44</sup> Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005, hlm. 37

<sup>45</sup> Abdul Bari Azed, "Sambutan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris pada Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Notaris Se- Jawa Tengah, Semarang: 30 Januari 2012.

- c. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Guna mencapai efektifitas dalam melakukan pemeriksaan Notaris MPD di Jawa Tengah dibentuk Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah. Di Jawa Tengah sudah ada kepengurusan INI sebanyak 24 Pengurus Daerah, oleh karena itu dengan didasari pada Surat Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 30 Desember 2005 Nomor : M.PW.07.02-36 tahun 2006 di Jawa Tengah dibentuk sejumlah 24 Majelis Pengawas Daerah Notaris.

## **B. Model Pengawasan Terhadap Notaris**

### **1. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Jabatan Notaris**

Model atau tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

1. Pasal 20 menyatakan bahwa :
  - 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan

Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.
- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

2. Pasal 21 menyatakan bahwa :

- a. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.



- b. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
  - d. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
  - e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
  - f. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
3. Pasal 22 menyatakan bahwa :
- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
  - 2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- 4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- 5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- 6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

## **2. Model Pengawasan Majelis Pengawas Daerah**

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris di wilayah Kota Semarang.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah secara umum diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, antara lain :

- a. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.
- b. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN . Pasal 84 UUJN merupakan sanksi

perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Notaris;
- b. Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dan
- c. Akademisi dari fakultas hukum.

Ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Perlunya anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun dari substansinya. Tanpa ada izin dari

MPD baik penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.<sup>46</sup>

Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD, yang berwenang :

1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berbeda dalam penyimpanan Notaris.

b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2) Formal dan (3) Materiil. Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur

---

<sup>46</sup> Suyanto, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 19 Maret 2012.

pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materiil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya.

MPD dapat tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Permasalahan yang muncul dalam tugas pengawasan adalah berkaitan dengan pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam dugaan kasus pemalsuan, maka sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam UUJN, maka MPD dapat menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik.<sup>47</sup>

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Tugas jabatan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Memberi penjelasan bahwa ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan

---

<sup>47</sup> Suyanto, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, dan diperkuat keterangan dari Widhi handoko, *Ketua Majelis Pengayom INI Daerah Kota Semarang*. Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 19 Maret 2012

dengan tugas penyidik dan penuntut dalam ruang lingkup perkara pidana.

MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim. Hal ini MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

### **3. Struktur dan Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris**

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk pertama kali diatur secara komprehensif perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum, yakni perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris dengan melakukan pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan atas adanya laporan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris di setiap daerah Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat. Sampai saat ini telah dibentuk Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas



Wilayah di 33 (tigapuluh tiga) Provinsi dan 108 (seratus delapan) Majelis Pengawas Daerah di setiap Kabupaten/Kota. Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris khususnya pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah dilakukan secara bertahap, akan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12. Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada :

1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
2. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Struktur kelembagaan Majelis Pengawasan Notaris, berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi.

Syarat untuk diangkat menjadi anggota MPN diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;

- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti;
- c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara berjenjang pengawas wilayah Notaris dengan MPW perlu kerjasama melakukan pembinaan kepada Notaris berkedudukan di wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Kegiatan dalam suatu pengawasan perlu pembinaan secara preventif. Fungsi pembinaan ditujukan agar yang

diawasi,yaitu Notaris selalu diingatkan untuk mencegah pelanggaran jabatan dan kode etik serta selalu memahami dan mematuhi aturan,baik berupa kode etik Notaris maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Pembinaan dilakukan secara berkala, bisa juga dilakukan saat pertemuan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah masing-masing.

Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan kedepan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 69 UUJN mengatur tentang MPD, yang berbunyi:

- a. MPD dibentuk di Kabupaten/Kota;
- b. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c. Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- e. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluhlima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;



- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Sedangkan Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu berwenang:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kemudian dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu :

- a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu :

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;

- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, Pengurus Organisasi Jabatan Notaris dan MPW. Hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu :

- a. Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan MPP.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-

PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUN, Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan kewenangan lain, yaitu :

- a. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada MPW, mengenai :
  - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - 2) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Nomor : W9.277.KP.11.05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang tertanggal 8 mei 2009, telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, dengan nama-nama anggota yang terdiri atas:

- a. I Nengah Mudani, S.H., M.Kn : Unsur Pemerintahan
- b. Adri Wibowo, SH. : Unsur Pemerintahan
- c. Humami, SH. : Unsur Pemerintahan
- d. Suyanto, SH. : Unsur Organisasi Notaris
- e. Indrijadi, SH. : Unsur Organisasi Notaris
- f. Hari Bagyo, SH. : Unsur Organisasi Notaris
- g. Nur Adhim, SH. : Unsur Akademisi
- h. Resti Nur Hayati, SH.,M.H. : Unsur Akademisi
- i. H. Wijaya, SH. : Unsur Akademisi

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut, kesembilan anggota MPD diminta oleh MPW Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua. Dari hasil rapat tersebut, kesembilan anggota MPD secara aklamasi memilih Suyanto, S.H. sebagai Ketua dan I Nengah Mudani S.H. MKn sebagai Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka susunan pengurus Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang yang beralamat di jalan Hanoman Nomor. 25 Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Suyanto, SH. Merangkap sebagai anggota
2. Wakil Ketua : I Nengah Mudani, SH., M.Kn. Merangkap sebagai anggota.
3. Anggota :
  - a. Adri Wibowo, SH.
  - b. Humami, SH.
  - c. Indrijadi, SH.
  - d. Hari Bagyo, SH.
  - e. Nur Adhim, SH.
  - f. B. Resti Nur Hayati, SH., M.H.
  - g. H. Wijaya, S.H

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2004 disebutkan bahwa MPD dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang berasal dari unsur pemerintahan dengan golongan ruang paling rendah III/b. Dengan demikian mengacu pada ketentuan di atas, maka sekretariat MPD harus memiliki minimal 3 (tiga) anggota sekretaris apabila MPD hendak melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang bersifat administratif.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah diangkat 3 (tiga) orang anggota sekretariat MPD, yaitu:

1. Sumardi, SH. : Sebagai Sekretaris
2. Hardini Ambarwati, SH., M.H. : Sebagai Staff Sekretariat
3. R. Danang A. Nugroho, SH., M.H. : Sebagai Staff Sekretariat

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004, tugas Sekretaris MPD adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- b. Membantu Ketua / Wakil ketua / Anggota;
- c. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- d. Membuat berita acara persidangan MPD;
- e. Membuat notulen rapat MPD;
- f. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
- g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada MPW.

Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. MPD melakukan



pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun terhadap Notaris yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur dibantu oleh satu orang sekertaris. Pemeriksaan meliputi:

1. Alamat kantor Notaris dan kondisi fisik kantor
2. SK pengangkatan Notaris
3. Berita acara sumpah jabatan Notaris
4. Surat keterangan ijin cuti Notaris
5. Sertifikat cuti Notaris
6. Protokol Notaris
7. Keadaan arsip
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanan)
9. Laporan bulanan, pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan
10. Uji petik minuta akta
11. Penyerahan protokol yang berumur 25 tahun/ lebih
12. Jumlah pegawai kantor Notaris
13. Sarana kantor
14. Penilaian hasil pemeriksaan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut penulis belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan, pada faktanya atauran-aturan yang secara ideal dapat diterapkan sesuai visi-misi dari pelaksanaan Pengawasan Notaris secara *existing* belum dilaksanakan secara baik. Maksud dan tujuan diadakan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Menurut Suyanto, Ketua MPD Notaris Kota Semarang, bahwa pelaksanaan kegiatan MPD Notaris Kota Semarang dan hasil monitoring serta evaluasi MPW tahun 2011, dan pemeriksaan yang dilakukan MPD terhadap Notaris secara administrasi, belum menunjukkan kinerja pengawasan yang baik, diantaranya berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Jawa Tengah, tahun 2012.

1. Masih ada beberapa MPD melakukan kegiatannya belum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Masih ada tata kerja Notaris yang belum memenuhi ketentuan administrasi kenotariatan yang berlaku;
3. Masih ada beberapa MPD yang belum memahami teknis penyerapan anggaran.

Pengakuan Suyanto tersebut didasari pada alasan-alasan logis diantaranya, alasan tentang kelembagaan MPD Notaris Kota Semarang yang sampai saat ini belum mempunyai kantor sendiri dan masih bersifat menumpang, belum mempunyai standar administrasi yang baik karena tidak didukung oleh peralatan administrasi yang layak untuk menunjang kinerja MPD Notaris Kota Semarang, dan belum mempunyai SDM yang baik karena SDM yang ada belum jelas mekanisme pemilihannya khususnya menyangkut integritas dan keahlian atau pengetahuannya tentang praktik jabatan Notaris.<sup>49</sup>

Uraian tersebut di atas, penulis memberikan penjelasan bahwa penanganan permasalahan tugas-tugas Notaris tersebut perlu adanya kesamaan pandangan diantara MPD di Jawa Tengah agar ada standar yang sama dalam melaksanakan kegiatan kenotariatan dan membuat suatu keputusan (untuk pengawasan) dengan didasarkan peraturan

---

<sup>49</sup> Suyanto, Ketua MPD Notaris Kota Semarang, wawancara pribadi, tanggal 19 Maret 2012

yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan lebih efektif dan efisien, terutama dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah.

Faktor-faktor Pengawasan Notaris secara ideal belum bisa dilaksanakan (model *ideal* belum berbanding dengan fakta empiris/*existing*) disebabkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap jabatan Notaris, masih menemui kendala atau hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. MPD kekurangan dana untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Dana tersebut seharusnya berasal dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan iuran dari masing-masing Notaris yang berada di kota Semarang, namun realisasinya jauh dari memadai untuk membiayai kegiatan operasional MPD. Kondisi ini membuat pelaksanaan fungsi dan peran MPD menjadi tidak efektif.
- b. Keterbatasan waktu dari masing-masing MPD yang terdiri dari unsur Notaris, dosen dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempat kerjanya masing-masing, sehingga kalau ada pertemuan jarang bisa hadir sehingga kurang ada komunikasi diantar para anggota MPD.
- c. MPD tidak mempunyai kantor Sekretariat sendiri untuk menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dan sebagai tempat penyimpanan minuta akta.

- d. MPD tida atau belum mempunyai program yang jelas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan Notaris.
- e. Aturan-aturan tatalaksana kerja MPD yang ada saat ini dinilai belum lengkap.
- f. Ketua MPD selalu mengalami kesulitan dalam menentukan Majelis Pemeriksa yang akan memeriksa Notaris.

**4. Model Pemeriksaan dan Pengawasan Notaris Terkait Dengan Minuta Akta.**

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai beberapa kewajiban antara lain harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian kewajiban tersebut dapat dikesampingkan, dengan didahului oleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, antara lain:

- a. Syarat Pemberian Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta oleh Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dengan syarat :

- 1) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dimaksud adalah diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan dan apabila tidak mengajukan permohonan tertulis, Majelis Pengawas Notaris menolak memberikan persetujuan untuk mengambil fotokopi Minuta Akta.

- b. Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengambilan Minuta Akta adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta.
- 2) Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk

membawa Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila :

- 1) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- 3) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- 4) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- 5) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dimaksud diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan

dan apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a, b, c, d dan e serta tidak mengajukan permohonan tertulis, Majelis Pengawas Daerah menolak memberikan persetujuan.

c. Syarat Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan persetujuan untuk memanggil Notaris dengan syarat :

Bahwa Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis yang memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris, apabila :

- 1) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan dan apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a dan b serta tidak



mengajukan permohonan tertulis, maka Majelis Pengawas Daerah menolak memberikan persetujuan.

Syarat persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan kewajibannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris, membuka, memperlihatkan minuta akta dan atau memberikan keterangan kepada pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban Notaris.

Penghapusan sifat melawan hukum dalam tindakan membuka rahasia oleh Notaris sebagai pejabat umum maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk memberikan persetujuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Uraian yang disampaikan dalam hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal pokok berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap tugas Notaris di Kota Semarang, yaitu :
  1. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, meliputi fungsi, tugas dan kewenangan: tidak hanya terfokus pada permasalahan terhadap Kode Etik dan UUJN secara normatif yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya, maka diperlukan pembinaan dan pemahaman kaedah-kaedah bersifat sosial (norma, etika dan perilaku).
  2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan mengusulkan sanksi terhadap Notaris. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta.

3. Pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, belum efektif karena terbentur masalah dana atau anggaran, sosialisasi yang masih kurang, dan MPD Notaris Kota Semarang kurang proaktif artinya sifatnya lebih menunggu laporan yang masuk dari masyarakat dan kordinasi antara unsur atau pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris masih belum berjalan dengan baik.
  4. Dana atau anggaran Majelis Pengawas Notaris seharusnya berasal dari APBN, karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan menjalankan perintah Undang-Undang,
  5. Sosialisasi bisa melalui media cetak atau elektronik serta yang paling penting adalah peran dari organisasi-organisasi Notaris dalam memberikan sosialisasi.
2. Model pengawasan terhadap Notaris yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebuah model pengawasan yang dapat mendorong terbentuknya kebijakan hukum, dengan berorientasi:
- a. Memenuhi unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukum yaitu:
    - 1) Keadilan hukum
    - 2) Kepastian hukum
    - 3) Kemanfaatan hukum
    - 4) Keseimbangan hukum
  - b. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial
  - c. Memenuhi prinsip keadilan substantif (perlindungan hukum bagi Notaris maupun MPN; keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan/kebahagiaan)

- d. Sesuai dengan asas-asas hukum dalam tugas dan kewenangan jabatan Notaris.
- e. Mendorong penerapan asas hukum kehati-hatian dan asas akurasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatan Notaris.
- f. Adanya keseimbangan hubungan hukum antara Notaris dan MPN (baik hak maupun kewajibannya)
- g. Adanya keseimbangan hubungan hukum antara Notaris-Pemerintah (baik hak maupun kewajibannya)
- h. Adanya keseimbangan antara kepentingan individu (si Notaris) dan kepentingan Jabatan (Notaris) terhadap fungsi hukum Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai kodratnya sebagai manusia, dalam koridor kepentingan Sosial.
- i. Adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Negara (MPN harus melihat secara luas dan mendorong Notaris berperan pada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, dan tidak terpaku pada aturan-aturan formalitas.
- j. Adanya penataan struktur kelembagaan baik MPN maupun Notaris, dengan mendasarkan standar kelembagaan yang efisien dan efektif.
- k. Adanya penataan administrasi (data base) pada sistem birokrasi dan pelayanan public baik di MPN maupun di kantor Notaris.
- l. Adanya fungsi pengawasan yang lebih sistematis dan terfokus pada pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik Notaris, dengan memberikan fasilitas pada MPN sesuai standar pengawasan (memadai dan baik).

--Temuan Penelitian: Penyimpangan terhadap sitem Pengawasan Notaris terjadi karena lemahnya sistem pengawasan itu sendiri, baik dari sisi SDM, struktur dan kelembagaan, serta birokrasi dan alat kelengkapannya. Menurut peneliti penyimpangan mana

disebabkan oleh kebijakan di bidang kenotariatan yang tidak responsif:

--Lemahnya pengawasan tersebut mempunyai implikasi pada lemahnya kinerja; fungsi, tugas, kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris sehingga mengakibatkan belum dapat mewujudkan keadilan dan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan pemerintah khususnya dalam pelayanan Notaris yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Berdasarkan kajian tersebut maka perlu dilakukan pembenahan atau reformulasi Model Pengawasan Notaris yang lebih menjamin keadilan.

## **B. Saran**

1. MPD harus lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penggilan.
2. MPD perlu melakukan koordinasi dan pertemuan rutin yang terjadwal dan teragendakan dengan baik, disertai laporan (*progres*) kinerja MPD, serta mengadakan sosialisasi hukum tentang UUJN kepada masyarakat luas.
3. MDP agar lebih independen selain dari unsur pemerintahan maka sebaiknya anggota MPD berasal dari unsur masyarakat umum,

para ahli atau akademisi yang mengerti tentang seluk beluk dunia Notaris.

4. Pemerintah : Presiden dan DPR perlu melakukan pembenahan atau reformulasi model pengawasan Notaris, dengan pengaturan Standar Prosedur Operasional Pengawasan Notaris secara Nasional yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
5. Pemerintah harus memasukan dalam APBN tentang anggaran bagi Majelis Pengawas Notaris yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor serta honor bagi anggota, sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Notaris dapat lebih ditingkatkan.